

TATA KELOLA KELEMBAGAAN PARTAI GERINDRA DALAM MEMENANGKAN PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

Arsa Ramdani^{1*}, Irawansyah²

¹²Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Penulis Korespondensi: ramdaniarsa985@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 31 Juni 2026 Accepted: 15 Agustus 2026 Published: 31 Agustus 2026	<i>The success of the Gerindra Party in retaining its seats in the 2024 Legislative Election in Sumbawa Regency is the result of planned and consistent institutional governance. This study analyzes how the Regional Leadership Council (DPC) of the Gerindra Party in Sumbawa Regency manages three institutional elements cognitive, normative, and regulative as formulated in Scott's (2008) New Institutionalism, and identifies the institutional factors contributing to the party's electoral resilience. The study employs a qualitative descriptive-analytical approach through in-depth interviews with two key informants, confirmed through triangulation with official party documents. Findings show that DPC Gerindra Sumbawa retained 5 DPRD seats in the 2024 election despite a decline in vote share from 12.0 percent (2019) to 9.5 percent (2024), accompanied by a rank shift from second to third place. The cognitive element is built through formal cadre education and an anti-vacuum strategy, though it has not yet reached the 165 villages at branch level. The normative element is reflected in grassroots engagement values, open recruitment, and collective decision-making. The regulative element is shown through proactive compliance with election commission regulations. Five key institutional factors contribute to electoral resilience: coordinated organizational structure, loyalty-building cadre systems, standardized and verified candidate recruitment, credibility-building regulatory compliance, and social programs as long-term political investment.</i>
Keywords Institutional Governance; Party Institutionalization; Legislative Election.	

PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau yang disingkat pemilu adalah proses demokrasi di mana warga negara yang memiliki hak pilih memilih wakilwakil mereka untuk menduduki jabatan politik tertentu dalam pemerintahan. Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat diwujudkan karena rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk memilih siapa yang akan memerintah dan mewakili kepentingan mereka.

Menurut Annisa (2023), tujuan utama pemilu adalah memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menyuarakan preferensi mereka dan memilih wakil-wakil yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan. Pemilihan umum diarahkan untuk membentuk sistem pemerintahan yang berlandaskan pada keinginan rakyat, memelihara prinsip-prinsip demokrasi, mendorong keterlibatan politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Keberlangsungan pemilu yang adil, bebas, dan transparan memiliki peranan penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara.

Keberhasilan partai politik dalam pemilu legislatif tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola kelembagaan partai. Tata kelola kelembagaan yang baik mencerminkan kemampuan partai dalam mengelola struktur organisasi, mengatur

mekanisme pengambilan keputusan, melaksanakan fungsi kaderisasi, serta mengkoordinasikan strategi politik dari tingkat pusat hingga akar rumput. Partai yang memiliki tata kelola kelembagaan yang kuat cenderung lebih solid dalam menghadapi kompetisi politik dan mampu memobilisasi sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan elektoral.

Peters (2021) menjelaskan bahwa kelembagaan dipahami sebagai seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membentuk pola hubungan dan tindakan para anggota organisasi. Dalam konteks partai politik, tata kelola kelembagaan yang baik ditandai dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan hierarkis, sistem rekrutmen dan kaderisasi yang terencana, mekanisme komunikasi internal yang efektif, serta kemampuan dalam membangun koalisi strategis. Partai dengan tata kelola kelembagaan yang kuat tidak hanya eksis secara formal, tetapi juga berfungsi secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas politik seperti rekrutmen anggota, penggalangan dana, dan mobilisasi pemilih.

North (2020) menegaskan bahwa lembaga berperan sebagai batasan yang diciptakan manusia untuk membentuk interaksi sosial dan politik. Hal ini berarti bahwa partai politik yang memiliki tata kelola kelembagaan yang baik akan memiliki kejelasan dalam pembagian tugas dan wewenang, sistem pengambilan keputusan yang demokratis namun efisien, serta mekanisme penyelesaian konflik internal yang konstruktif. Tata kelola kelembagaan yang baik juga memungkinkan partai untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan politik dan merespons dinamika aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat.

Dalam konteks pemilihan umum legislatif, tata kelola kelembagaan partai menjadi faktor krusial yang menentukan kemampuan partai dalam merebut kursi di parlemen. Partai dengan tata kelola kelembagaan yang kuat memiliki keunggulan komparatif dalam hal koordinasi kampanye, penetrasi geografis, dan konsolidasi dukungan. Sistem tata kelola yang solid memungkinkan partai untuk menerjemahkan strategi politik tingkat pusat ke dalam aksi konkret di tingkat lokal. Jaringan kader yang terlatih dan termotivasi, yang dihasilkan dari sistem kaderisasi yang baik, menjadi tulang punggung operasional kampanye yang efektif untuk mempertahankan eksistensi elektoral.

Dalam konteks Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Sumbawa tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional yang turut membentuk persepsi dan preferensi pemilih di tingkat daerah. Dalam Pemilu Legislatif 2024, sebanyak 10 partai berhasil menempatkan wakilnya di DPRD. PKS dan Golkar diperingkat pertama dengan masing-masing meraih 6 kursi, di bawahnya NasDem, PDIP dan Gerindra yang sama-sama meraih 5 kursi, PKB, PAN dan Gelora diperingkat ketiga dengan perolehan 4 kursi, dan terakhir Demokrat dan PPP dengan raihan masing-masing 3 kursi. Kondisi ini mencerminkan sebuah pola yang lazim terjadi dalam sistem multipartai yang matang, yakni kompetisi elektoral yang semakin berpusat pada kapasitas kelembagaan partai ketimbang sekadar popularitas figur individual. Oleh karena itu, partai politik harus terus berbenah dan memperkuat kelembagaannya secara dinamis agar tidak tergerus oleh momentum pertumbuhan partai-partai pesaing yang bergerak lebih agresif.

Sebagai perbandingan dengan Pemilu 2019, Partai Gerindra yang menjadi objek penelitian ini mengalami pergeseran peringkat dari posisi kedua ke posisi ketiga di DPRD Kabupaten Sumbawa sehingga menjadi temuan yang menarik sekaligus paradoks yang perlu dikaji lebih mendalam. Meskipun jumlah kursi Gerindra tidak mengalami penambahan, namun persentase suara justru menurun dari 12,0% menjadi 9,5%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tata kelola kelembagaan Gerindra di Kabupaten Sumbawa masih perlu diperkuat agar penurunan suara tidak berlanjut dan dapat dikonversi menjadi penambahan kursi pada pemilu mendatang.

Kabupaten Sumbawa sebagai arena kontestasi politik memiliki sejumlah karakteristik yang membuat dinamika kelembagaan partai di wilayah ini menjadi sangat menarik untuk dikaji. Kabupaten Sumbawa merupakan wilayah dengan luas geografis yang sangat besar, dan memiliki karakteristik sosial ekonomi yang sangat beragam. Luasnya wilayah Kabupaten Sumbawa menciptakan tantangan logistik yang nyata bagi setiap partai dalam mengorganisir kampanye yang menjangkau seluruh lapisan pemilih. Partai yang memiliki jaringan organisasi yang terbentang hingga ke pelosok-pelosok kecamatan terpencil akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dibandingkan partai yang hanya kuat di wilayah perkotaan. Selain itu, Kabupaten Sumbawa memiliki komposisi pemilih yang heterogen, sehingga membutuhkan pendekatan kampanye yang diferensiasi dan adaptif terhadap kebutuhan serta aspirasi yang berbeda-beda di setiap segmen pemilih.

Kabupaten Sumbawa juga memiliki tradisi adat dan budaya yang masih sangat kental dan berpengaruh dalam kehidupan sosial-politik masyarakat. Institusi-institusi sosial berbasis adat seperti kelompok keagamaan, lembaga adat Samawa, serta jaringan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk preferensi politik masyarakat. Partai yang mampu menjalin hubungan yang baik dengan institusi-institusi sosial ini dan mengintegrasikan pendekatan berbasis kearifan lokal ke dalam strategi politiknya akan memiliki keunggulan yang sulit untuk direplikasi oleh pesaing dalam jangka pendek. Kemampuan membangun modal sosial berbasis kepercayaan masyarakat ini hanya dapat dibangun melalui kehadiran yang konsisten dan tulus dalam jangka panjang, bukan semata-mata melalui kampanye musiman yang bersifat transaksional.

Dalam konteks karakteristik lokal yang demikian kompleks dan kompetitif, pertanyaan tentang bagaimana Partai Gerindra mengelola kelembagaannya agar mampu meraih dan mempertahankan kursi di DPRD Kabupaten Sumbawa menjadi sangat relevan dan bernilai akademis. Secara keseluruhan, tata kelola kelembagaan Gerindra Kabupaten Sumbawa menunjukkan adanya upaya yang cukup serius dalam membangun sistem partai yang terorganisasi, namun masih terdapat kesenjangan antara desain kelembagaan yang direncanakan dengan implementasi aktual di lapangan, khususnya di tingkat struktur terbawah.

Dalam kampanye Pemilu Legislatif 2024, DPC Gerindra Kabupaten Sumbawa berupaya mengintegrasikan berbagai metode kampanye, mulai dari pendekatan *door-to-door*, pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, hingga pemanfaatan media sosial. Upaya integrasi ini menunjukkan adanya kesadaran partai akan pentingnya pendekatan yang beragam dan kontekstual. Namun demikian, efektivitas integrasi tersebut sangat bergantung pada kekuatan jaringan struktural yang ada, dan mengingat kondisi ranting di tingkat desa yang masih lemah, implementasi strategi kampanye yang merata ke seluruh dapil belum sepenuhnya dapat tercapai. Keterbatasan ini juga tercermin dari fakta bahwa perolehan kursi Gerindra tidak bertambah dari Pemilu 2019, sejalan dengan penurunan suara dan persentase suara yang dialami partai.

Capaian Partai Gerindra dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa tidak dapat dilepaskan dari upaya penguatan kelembagaan partai yang dilakukan secara bertahap. Kelembagaan partai politik mencakup berbagai aspek mulai dari struktur organisasi, mekanisme rekrutmen politik, sistem pengambilan keputusan, hingga mobilisasi massa di tingkat akar rumput. Meski demikian, perlu dicatat bahwa upaya penguatan ini belum menghasilkan penambahan kursi Gerindra tetap di angka 5 kursi seperti Pemilu 2019 yang mengisyaratkan bahwa tata kelola kelembagaan partai masih berada dalam proses pematangan dan belum mencapai level yang optimal untuk mendorong pertumbuhan elektoral yang signifikan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, tata kelola kelembagaan Partai Gerindra di Kabupaten Sumbawa menjadi variabel yang relevan untuk dikaji dalam memahami capaian elektoral partai pada Pemilu Legislatif 2024. Penelitian ini penting secara akademis untuk memetakan sejauh mana kondisi kelembagaan Gerindra Sumbawa telah berkembang, di mana letak kekuatannya, dan aspek apa yang masih memerlukan perbaikan. Dengan memahami dinamika tata kelola kelembagaan secara jujur dan kritis termasuk kelemahannya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik lokal dan peningkatan kualitas kelembagaan partai di wilayah Nusa Tenggara Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Menurut Creswell dan Creswell (2023), penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, dengan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat dalam bentuk kuantitas atau jumlah. Sementara metode deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena tertentu dan menganalisis hubungan antar variabel yang diamati.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kelembagaan Partai Gerindra dalam konteks kemenangan Pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi yang mendalam mengenai struktur organisasi, mekanisme internal, strategi politik, dan dinamika kelembagaan partai yang berperan dalam memenangkan Pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus utama yang menjadi sasaran pengamatan, kajian, dan analisis dalam suatu penelitian. Dalam konteks penelitian ini, objek yang diteliti berfokus pada bagaimana tata kelola kelembagaan Partai Gerindra dalam memenangkan Pemilu Legislatif di Kabupaten Sumbawa tahun 2024. Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik kelembagaan Partai Gerindra, kemudian menganalisis bagaimana aspek-aspek kelembagaan tersebut berkontribusi terhadap kemenangan elektoral dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Sumbawa tahun 2024.

Sementara subyek penelitian adalah pihak atau individu yang menjadi sumber utama data dalam penelitian. Penentuan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, maka subjek pada penelitian ini adalah pimpinan atau pengurus maupun kader partai yang dapat memberikan informasi terkait bagaimana tata kelola kelembagaan Partai Gerindra pada Pemilu 2024.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, observasi yang dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana tata kelola kelembagaan Partai Gerindra dalam memenangkan Pemilu Legislatif di Kabupaten Sumbawa tahun 2024. Kedua, wawancara terbuka yang dilakukan secara langsung dengan informan untuk menggali secara mendalam pandangan, dan pengalaman yang mereka rasakan terkait tata kelola kelembagaan Partai Gerindra dalam memenangkan

Pemilu Legislatif di Kabupaten Sumbawa tahun 2024. Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen resmi, seperti surat-surat, laporan, catatan harian, foto kegiatan, dan sebagainya untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2019) yang meliputi tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan untuk memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu membandingkan keterangan kedua informan dan mencocokkannya dengan dokumen resmi partai seperti Sumpah Kader, Pakta Integritas, Surat Pemberitahuan Kampanye, dan Laporan Dana Kampanye yang disusun sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 dan Nomor 18 Tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa menjadi arena pertarungan sengit bagi partai-partai politik dalam upaya mereka merebut dan mempertahankan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di balik dinamika politik ini, terdapat kekuatan-kekuatan kelembagaan yang berperan penting dalam membentuk strategi dan hasil pemilu. Melalui kerangka teori kelembagaan baru Scott (2008), penelitian ini mengungkap bagaimana elemen regulatif, normatif, dan kognitif bekerja secara sinergis dalam memengaruhi keberhasilan Partai Gerindra di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan, diperoleh informasi berkaitan dengan tata kelola kelembagaan Partai Gerindra dalam memenangkan Pemilu Legislatif di Kabupaten Sumbawa tahun 2024, yang disajikan secara terperinci berikut ini.

1. Elemen Kognitif: Kesadaran Struktural dan Pembentukan Identitas Kader

Elemen kognitif dalam teori kelembagaan baru Scott (2008) menyoroti pemahaman, keyakinan, dan persepsi individu serta kelompok terhadap lembaga politik dan proses pemilihan. Dalam konteks penelitian ini, elemen kognitif mencakup bagaimana pengurus, kader, dan aktor politik di Kabupaten Sumbawa memahami peran Partai Gerindra dalam sistem politik, serta bagaimana persepsi mereka terhadap legitimasi dan identitas partai tersebut. Elemen ini juga mencakup sejauh mana pengetahuan organisasional telah terinternalisasi dalam diri kader sehingga membentuk kesadaran kolektif yang mendorong loyalitas dan efektivitas kerja partai.

Elemen kognitif kelembagaan DPC Gerindra Sumbawa tercermin dari kesadaran situasional pimpinan partai terhadap kekuatan dan kelemahan struktur organisasinya. DPC Gerindra Sumbawa memiliki 24 Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang menjangkau seluruh kecamatan, dengan koordinasi di tingkat kecamatan yang telah berjalan sekitar 80 persen sesuai harapan. Akan tetapi, pimpinan partai secara jujur mengakui bahwa struktur ranting di tingkat desa masih jauh dari harapan, sebuah pengakuan penting mengingat Kabupaten Sumbawa memiliki 165 desa yang menjadi basis pemilih potensial namun belum terjangkau secara optimal.

Kesadaran akan keterbatasan ini direspons melalui pemberdayaan sayap-sayap partai sebagai mekanisme kompensasi struktural. Sistem pengkaderan formal yang diatur dalam AD/ART Partai Gerindra mencakup Pendidikan Kader Pratama (PKP) di tingkat ranting dan PAC, Pendidikan Kader Madya (PKM) di tingkat DPC dan DPD, serta Pendidikan Kader Utama (PKU) di tingkat DPP, yang turut membentuk kader dengan tanggung jawab dan keteguhan jiwa terhadap partai. Strategi anti-vakum, yaitu menjaga agar organisasi tidak pernah kosong dari kegiatan, memperkuat *sense of belonging* kader sehingga mobilisasi pada masa pemilu dapat berjalan tanpa perlu mengaktivasi ulang kader dari nol.

Keberadaan regulasi pengkaderan yang tersistematisasi dalam AD/ART ini menunjukkan bahwa strategi pengkaderan pada Partai Gerindra Kabupaten Sumbawa bukan sekadar inisiatif lokal DPC, melainkan merupakan implementasi dari sistem kelembagaan yang dirancang di tingkat nasional dan kemudian diadaptasi sesuai kapasitas dan kebutuhan di tingkat daerah. Dengan demikian, elemen kognitif dalam kelembagaan Gerindra memiliki fondasi formal yang tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan, bukan hanya bersandar pada pemahaman dan inisiatif personal pengurus semata.

2. Elemen Normatif: Nilai Turun ke Bawah dan Kolektivitas

Elemen normatif dalam teori kelembagaan baru Scott (2008) mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan ekspektasi yang mempengaruhi perilaku politik dalam kelembagaan. Dalam konteks penelitian ini, elemen normatif dapat dilihat dari bagaimana norma-norma yang dimiliki Partai Gerindra Sumbawa memengaruhi strategi dan tindakan partai dalam memenangkan pemilu, serta bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk cara kader dan pengurus berinteraksi dengan masyarakat. Elemen normatif juga mencakup standar etis dan moral yang menjadi pedoman perilaku seluruh komponen partai.

Nilai utama yang menjadi norma operasional DPC Gerindra Sumbawa adalah semangat turun ke bawah dan merebut hati rakyat. Norma ini terwujud dalam kampanye door-to-door, pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan adat, pendekatan yang selaras dengan karakter sosial masyarakat Sumbawa yang menjunjung tinggi hubungan personal. Namun demikian, norma ini lebih terwujud pada level personal kader dan caleg dibanding pada tataran struktural yang melembaga hingga ke ranting desa.

Dalam konteks kemenangan pemilu, Gerindra Sumbawa juga menjunjung tinggi norma transparansi dan keterbukaan yang tercermin dari proses rekrutmen calon legislatif yang tidak tertutup bagi kader internal semata, melainkan juga terbuka bagi masyarakat umum melalui panitia kerja yang melakukan seleksi bertahap. DPC Gerindra tidak menutup pintu bagi masyarakat umum yang ingin berkontestasi, dan proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan membentuk panitia kerja yang melakukan seleksi bertahap.

DPC Gerindra tidak menutup pintu bagi masyarakat umum yang ingin berkontestasi, dan proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan membentuk panitia kerja yang melakukan seleksi bertahap. Norma kolektivitas ditegaskan melalui mekanisme pengambilan keputusan penetapan caleg yang bersifat kolektif, bukan keputusan personal pimpinan, sehingga menghindarkan partai dari personalisasi kekuasaan. Kepatuhan kader ditegakkan melalui Sumpah Kader yang mengodifikasi nilai kepatuhan dan patriotisme secara formal, serta norma tidak tertulis mengenai solidaritas antarcaleg dalam satu dapil, di mana caleg yang tidak terpilih diharapkan mengarahkan basis dukungannya kepada sesama kader Gerindra agar suara tidak beralih ke partai lain.

Selain itu, dimensi normatif yang tidak kalah penting adalah komitmen partai terhadap program-program sosial yang mencerminkan nilai-nilai kepedulian terhadap rakyat. Wujud nyata norma kepedulian sosial partai tampak pada program Revolusi Putih, yaitu pembagian susu gratis di sekolah-sekolah yang telah dijalankan secara rutin jauh sebelum program Makan Bergizi Gratis pemerintah pusat diluncurkan. Setiap calon legislatif juga diwajibkan menandatangani Pakta Integritas sebelum hari pencoblosan sebagai bentuk komitmen formal untuk tetap loyal kepada masyarakat pascaterpilih.

Dengan demikian, elemen normatif Gerindra Sumbawa kuat dalam hal orientasi kepada rakyat, keterbukaan rekrutmen, dankolektivitas pengambilan keputusan. Nilai-nilai ini terwujud dalam tindakan konkret partai di lapangan, bukan sekadar retorika, sehingga membangun kepercayaan dan legitimasi di mata masyarakat Kabupaten Sumbawa. norma-norma yang berjalan di DPC Gerindra Sumbawa bukan semata-mata bersifat informal dan lisan, melainkan sebagian telah dikodifikasi dalam bentuk dokumen formal yang memperkuat akuntabilitas kelembagaan partai.

3. Elemen Regulatif: Kepatuhan Proaktif terhadap Regulasi

Elemen regulatif dalam teori kelembagaan baru Scott (2008) mengacu pada aturan-aturan formal yang mengatur perilaku dan interaksi dalam kelembagaan politik, seperti undang-undang pemilu, peraturan KPU, dan regulasi terkait proses pemilihan. Dalam konteks penelitian ini, elemen regulatif menjelaskan bagaimana aturan-aturan formal tersebut memengaruhi strategi dan tindakan DPC Gerindra Kabupaten Sumbawa dalam memenangkan Pemilu Legislatif 2024, serta bagaimana partai mengembangkan mekanisme kepatuhan internal yang memastikan seluruh komponen organisasi bergerak sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Elemen regulatif kelembagaan Gerindra Sumbawa tercermin dari kepatuhan yang konsisten terhadap peraturan KPU sebagai acuan utama dalam setiap mekanisme pemilu. Setiap kegiatan kampanye caleg diajukan lebih dahulu kepada DPC, yang kemudian meneruskan pemberitahuan kepada KPU dan kepolisian, menempatkan DPC sebagai mediator formal sekaligus gatekeeper ketertiban kampanye. Pembentukan 24 PAC di seluruh kecamatan juga merupakan pemenuhan persyaratan verifikasi partai sebagaimana diatur undang-undang, yang sekaligus dimaknai sebagai fondasi strategis penguatan jaringan elektoral.

Proses rekrutmen caleg melalui panitia kerja mencakup tahapan yang melampaui standar minimum KPU, yaitu pengumpulan dokumen administratif, dukungan tertulis dari tokoh agama dan masyarakat, tes pemahaman kebangsaan, wawancara, tes kesehatan jasmani-rohani, tes narkoba, dan SKCK. Yang membedakan mekanisme regulatif Gerindra Sumbawa adalah verifikasi lapangan aktif, di mana tim seleksi mengonfirmasi langsung kebenaran setiap tanda tangan dukungan kepada masyarakat, sebuah praktik yang melampaui kewajiban formal namun memperkuat kredibilitas dan integritas proses rekrutmen. Pemusatan pelaporan anggaran kampanye di tingkat DPC sesuai PKPU Nomor 18 Tahun 2023 turut menunjukkan komitmen partai terhadap akuntabilitas finansial pemilu.

Terkait dengan mekanisme internal partai, partai Gerindra memiliki aturan partai yang memuat batasan-batasan tertentu terkait rekrutmen dan hal-hal prinsipil lainnya, meskipun tidak terlampaui kaku. Aturan internal ini bersifat komplementer terhadap regulasi eksternal, memberikan panduan yang lebih kontekstual kepada kader dan pengurus dalam menjalankan tugastugas partai. Fleksibilitas dalam penerapan aturan internal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya mencerminkan kematangan kelembagaan yang adaptif. Partai yang terlalu kaku

dalam aturan internalnya cenderung sulit beradaptasi dengan dinamika politik lokal yang terus berubah, sementara partai tanpa aturan yang jelas akan mudah mengalami konflik internal. DPC Gerindra Sumbawa tampak berhasil menemukan titik keseimbangan antara ketertiban regulatif dan fleksibilitas operasional.

Dalam hal mekanisme pengambilan keputusan yang berkaitan dengan regulasi, DPC Gerindra Sumbawa juga memastikan bahwa setiap keputusan strategis termasuk penetapan caleg dan alokasi wilayah kampanye dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan internal partai. Keberadaan panitia kerja (Panker) sebagai badan yang berwenang dalam proses rekrutmen dan seleksi caleg merupakan wujud nyata dari institusionalisasi mekanisme regulatif internal yang terstruktur. Dalam hal ini, partai secara aktif membangun regulasi internal yang menjamin kualitas caleg yang diusung, sehingga meminimalisir risiko elektoral akibat caleg yang tidak kompeten atau memiliki masalah integritas.

Aspek penting lain dari elemen regulatif adalah proses pembentukan struktur organisasi yang juga didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Pembentukan PAC di 24 kecamatan dilakukan antara lain untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang, di mana sebuah partai harus memenuhi persentase minimum pembentukan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota untuk dapat mengikuti verifikasi dan lolos sebagai peserta pemilu.

Dengan demikian, elemen regulatif DPC Gerindra Sumbawa berjalan dengan tertib dan sistematis, ditandai dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi KPU, mekanisme kampanye yang terkoordinasi, dan aturan internal yang fleksibel namun berprinsip. Kombinasi kepatuhan eksternal dan tertib internal ini memperkuat kredibilitas dan legitimasi partai di mata penyelenggara pemilu maupun masyarakat. Hal ini tidak hanya memenuhi kewajiban regulatif formal, tetapi juga menciptakan mekanisme akuntabilitas internal yang memungkinkan DPC memantau dan mengkoordinasikan pengeluaran kampanye seluruh caleg secara terpadu.

4. Faktor-Faktor Kelembagaan yang Berkontribusi Terhadap Ketahanan Elektoral

Kemampuan Gerindra mempertahankan 5 kursi DPRD di tengah penurunan suara dan pergeseran peringkat merupakan hasil sinergi lima faktor kelembagaan berikut:

- a. Struktur organisasi yang terkoordinasi dari DPC hingga PAC di 24 kecamatan, memungkinkan distribusi informasi dan mobilisasi kader berjalan sistematis di tingkat kecamatan, meski belum merata hingga ranting desa;
- b. Sistem pengkaderan yang membentuk loyalitas melalui jenjang pendidikan formal dan strategi anti-vakum, menghasilkan kader dengan kesiapan mobilisasi tinggi tanpa perlu diaktivasi ulang menjelang pemilu;
- c. Rekrutmen calon legislatif yang terstandarisasi dan terbuka, mencerminkan dimensi scope organizational power (Levitsky & Way, 2020) melalui verifikasi lapangan basis dukungan riil, bukan sekadar popularitas kandidat;
- d. Kepatuhan regulatif yang membangun kredibilitas, mencerminkan dimensi cohesion organizational power melalui disiplin internal dan ketertiban prosedural yang konsisten;
- e. Program sosial sebagai investasi politik jangka panjang, seperti Revolusi Putih, yang membangun modal sosial dan kehadiran nyata partai di tengah masyarakat jauh sebelum masa kampanye dimulai.

Kelima faktor ini juga berperan sebagai modal politik dalam membangun koalisi Pilkada. Perolehan 5 kursi DPRD memperkuat posisi tawar Gerindra sehingga

mampu menjadi mitra koalisi yang solid bersama NasDem dalam mengantarkan kemenangan pasangan Jarot-Ansori pada Pilkada Kabupaten Sumbawa 2024. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan kelembagaan partai tidak hanya berdampak pada satu kontestasi elektoral, melainkan pada keseluruhan ekosistem politik lokal.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa capaian DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumbawa dalam Pemilu Legislatif 2024 mempertahankan 5 kursi di tengah penurunan suara dari 12,0 persen menjadi 9,5 persen merupakan hasil dari sinergi antara ketiga elemen kelembagaan dalam teori Scott (2008), yaitu elemen kognitif, normatif, dan regulatif. Perlu ditegaskan bahwa capaian ini lebih tepat dibaca sebagai ketahanan elektoral di tengah persaingan yang semakin ketat dan dukungan pemilih yang justru menurun, bukan sebagai kemenangan dominan, mengingat Gerindra juga tergeser dari peringkat kedua ke peringkat ketiga akibat laju pertumbuhan PKS dan Golkar yang lebih agresif. Ketiga elemen kelembagaan ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain, namun dengan catatan bahwa masing-masing elemen masih memiliki celah dan keterbatasan yang perlu dibenahi.

Elemen kognitif menyediakan fondasi pemahaman dan kesadaran yang memungkinkan partai dan kadernya untuk membaca situasi politik dengan tepat, menginternalisasi identitas dan nilai partai, serta merumuskan strategi yang adaptif terhadap kondisi lokal. Namun elemen kognitif ini berfungsi lebih kuat di tingkat DPC dan PAC dibanding di tingkat ranting desa. Tanpa internalisasi kognitif yang merata hingga ke 165 desa di Kabupaten Sumbawa, struktur organisasi di lapisan terbawah tidak dapat bergerak secara mandiri, sehingga partai masih sangat bergantung pada kekuatan personal kader dan jaringan sayap partai sebagai kompensasinya.

Elemen normatif menerjemahkan pemahaman kognitif tersebut ke dalam perilaku nyata yang konsisten. Nilai-nilai seperti ‘turun ke bawah’, keterbukaan rekrutmen, dan kolektivitas pengambilan keputusan menjadi kompas moral yang mengarahkan tindakan setiap komponen partai di tingkat DPC dan PAC. Norma-norma ini menciptakan kohesi internal yang cukup kuat dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap partai. Namun perlu dicatat bahwa norma “turun ke bawah” lebih terwujud pada level personal kader dan caleg dibanding pada tataran kelembagaan struktural. Selama norma ini belum melembaga secara formal hingga ranting desa, ketahanan elektoral Gerindra di Sumbawa akan tetap bergantung pada kekuatan individu kader, bukan pada sistem yang berkelanjutan.

Elemen regulatif menyediakan kerangka formal yang memberikan kepastian, legitimasi, dan akuntabilitas bagi seluruh proses organisasional. Kepatuhan terhadap regulasi KPU dan pemeliharaan aturan internal yang berprinsip memastikan bahwa partai bergerak dalam koridor yang diakui secara hukum dan dipandang kredibel oleh semua pemangku kepentingan.

Refleksi evaluatif mengenai faktor penentu keberhasilan Gerindra dalam Pemilu Legislatif 2024 tersebut tidak hanya dari sisi internal partai, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, yaitu keterkaitannya dengan keberhasilan Gerindra membangun koalisi yang solid dalam Pilkada Kabupaten Sumbawa 2024. Ketiga elemen kelembagaan bekerja secara sinergis, di mana elemen kognitif membangun fondasi identitas dan kesadaran kolektif, elemen normatif menerjemahkannya ke dalam perilaku nyata yang konsisten, dan elemen regulatif memastikan legitimasi serta akuntabilitas proses.

Namun, sinergi ini baru solid di tingkat DPC dan PAC, dengan kesenjangan nyata di tingkat ranting desa. Temuan ini menjelaskan mengapa Gerindra mampu bertahan

(*resilient*) namun belum mampu tumbuh (*growth*), karena kelima faktor kelembagaan yang teridentifikasi terbukti cukup untuk mempertahankan eksistensi elektoral, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong pertambahan kursi maupun membalikkan tren penurunan suara.

Berdasarkan keseluruhan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik benang merah yang jelas bahwa keberhasilan DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumbawa dalam mempertahankan 5 kursi DPRD pada Pemilu Legislatif 2024 bukanlah sebuah keberuntungan semata, melainkan merupakan buah dari kerja kelembagaan yang terencana, konsisten, dan terpadu. DPC Partai Gerindra Sumbawa berhasil mengelola ketiga elemen kelembagaan yaitu kognitif, normatif, dan regulatif secara sinergis sehingga menghasilkan kapasitas organisasional yang tangguh dalam menghadapi persaingan elektoral yang semakin ketat di Kabupaten Sumbawa.

Tabel 1. Ringkasan Tiga Elemen Kelembagaan DPC Gerindra Kabupaten Sumbawa

Elemen	Implementasi Utama	Kontribusi Terhadap Kemenangan
Kognitif	24 PAC, jenjang pengkaderan formal (PKP, PKM, PKU), strategi anti-vakum	Membangun kesadaran kolektif dan kesiapan mobilisasi kader
Normatif	Kampanye door-to-door, rekrutmen terbuka, Sumpah Kader, Pakta Integritas, Revolusi Putih	Membangun kepercayaan masyarakat dan kohesi internal
Regulatif	Koordinasi DPC-KPU-Polri, seleksi caleg terstandarisasi dengan verifikasi lapangan	Menjaga kredibilitas, legitimasi, dan kelancaran proses kontestasi

Data yang disajikan dalam tabel diatas merupakan bukti nyata dari kelembagaan partai yang matang, di mana ketiga elemen kelembagaan kognitif, normatif, dan regulatif bekerja secara sinergis tidak hanya dalam satu kontestasi, tetapi dalam keseluruhan ekosistem politik lokal Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian, keberhasilan DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumbawa dalam mempertahankan 5 kursi DPRD pada Pemilu Legislatif 2024 bukanlah sebuah keberuntungan semata, melainkan merupakan buah dari kerja kelembagaan yang terencana, konsisten, dan terpadu.

Dari sisi elemen kognitif, DPC Gerindra Sumbawa membangun kesadaran organisasional yang cukup kuat di tingkat DPC dan PAC melalui sistem pengkaderan formal, strategi anti-vakum, dan kepemimpinan yang memiliki pemahaman situasional yang matang. Kesadaran yang jujur bahwa jaringan di tingkat PAC sudah berjalan 80 persen sesuai harapan sementara tingkat ranting masih sangat jauh dari harapan mendorong partai mengembangkan strategi kompensasi melalui pemberdayaan sayap-sayap partai. Meski demikian, keterbatasan di 165 desa ini merupakan kelemahan kognitif struktural yang nyata: tanpa internalisasi identitas dan nilai partai yang menjangkau lapisan terbawah, pertumbuhan elektoral Gerindra akan terus terbatas dan bergantung pada kekuatan personal kader, bukan pada sistem kelembagaan yang mandiri dan berkelanjutan.

Dari sisi elemen normatif, partai konsisten menjalankan nilai-nilai turun ke bawah, keterbukaan rekrutmen, dan kolektivitas pengambilan keputusan yang tidak hanya terucap sebagai retorika kampanye, tetapi tercermin dalam tindakan-tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh kader maupun masyarakat. Program Revolusi Putih yang dijalankan secara rutin jauh sebelum pemilu adalah contoh paling nyata dari norma kelembagaan yang diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.

Konsistensi inilah yang membangun modal sosial partai yang sulit ditiru pesaing dalam waktu singkat.

Dari sisi elemen regulatif, DPC Gerindra Sumbawa tidak hanya mematuhi regulasi KPU secara tertib sebagai kewajiban formal semata, tetapi juga secara proaktif mengembangkan mekanisme-mekanisme internal yang mengubah tuntutan regulatif menjadi keunggulan strategis. Mekanisme panitia kerja yang terstandarisasi, prosedur koordinasi kampanye yang tertib, dan aturan internal yang fleksibel namun berprinsip adalah wujud nyata dari pendekatan regulatif yang dewasa dan strategis.

Sinergi antara ketiga elemen inilah yang membedakan Gerindra Sumbawa dari partai-partai lain yang mungkin unggul dalam satu atau dua elemen tetapi lemah di elemen lainnya. Kelembagaan yang terpadu di mana kognitif, normatif, dan regulatif bekerja secara harmonis menciptakan kapasitas organisasional yang optimal untuk bersaing dan memenangkan kontestasi elektoral dalam lingkungan politik yang semakin kompetitif di Kabupaten Sumbawa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis tata kelola kelembagaan Partai Gerindra di Kabupaten Sumbawa dalam memenangkan Pemilu Legislatif 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor kelembagaan yang berkontribusi terhadap kemenangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola kelembagaan DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumbawa dalam memenangkan Pemilu Legislatif 2024 dapat dijelaskan melalui tiga elemen dalam Teori Kelembagaan Baru, yaitu kognitif, normatif, dan regulatif. Elemen kognitif membangun pemahaman situasional dan identitas kolektif kader namun baru optimal di tingkat DPC dan PAC. Elemen normatif mewujudkan nilai turun ke bawah, keterbukaan, dan kolektivitas dalam tindakan nyata seperti program Revolusi Putih dan Pakta Integritas. Elemen regulatif menunjukkan kepatuhan proaktif terhadap regulasi KPU sekaligus memperkuat struktur hingga tingkat PAC.

Berkaitan dengan faktor-faktor kelembagaan yang berkontribusi terhadap kemenangan Partai Gerindra dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Sumbawa, teridentifikasi lima faktor yang menopang kemampuan partai mempertahankan 5 kursi DPRD, yaitu struktur organisasi terkoordinasi, sistem pengkaderan pembentuk loyalitas, rekrutmen caleg terstandarisasi, kepatuhan regulatif, dan program sosial berkelanjutan terutama Revolusi Putih, sebagai investasi politik jangka panjang. Kelima faktor tersebut bekerja secara sinergis dan menjadi penopang utama ketahanan elektoral partai. Meski demikian, kelima faktor tersebut belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan kursi maupun membalikkan tren penurunan suara, sehingga penguatan lebih lanjut khususnya di tingkat ranting desa menjadi agenda kelembagaan yang mendesak untuk pemilu-pemilu mendatang.

SARAN

Berdasarkan analisis kelembagaan DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumbawa dalam memenangkan Pemilu Legislatif 2024, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dan penguatan kelembagaan partai politik di masa mendatang.

1. Bagi DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumbawa

Meskipun DPC Partai Gerindra Sumbawa telah berhasil membangun koordinasi yang cukup baik di tingkat PAC (kecamatan), kondisi ranting di tingkat desa masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, sayap-sayap partai yang telah terbukti efektif sebagai jaringan komplementer perlu didorong untuk semakin memperdalam

penetrasinya di tingkat desa dengan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur bersama DPC dan PAC. Selain itu, program-program sosial yang telah menjadi keunggulan normatif Gerindra juga perlu terus dipertahankan dan bahkan diperluas cakupan maupun variasi programnya. Konsistensi kehadiran partai di tengah masyarakat melalui program-program nyata yang berdampak adalah investasi modal sosial yang sangat penting agar keberadaan partai tidak hanya terlihat saat momentum pemilu.

2. Bagi Kaden dan Simpatisan Partai

Bagi kaden dan simpatisan partai diharapkan dapat menjaga citra positif partai di tengah masyarakat melalui sikap, perilaku, dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai organisasi serta menghindari konflik yang dapat merugikan kepercayaan publik. Selain itu, kaden dan simpatisan partai juga diharapkan dapat menjaga solidaritas antaranggota partai dengan mengutamakan kerjasama, disiplin organisasi, dan kepentingan bersama dalam mendukung keberhasilan partai pada pemilu mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2022). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Firmansyah, J., Kariyani, L. N., & Rizkia, G. (2022). Strategi Pemenangan Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 4(1), 1-14.
- Gunawan, T. (2024). Adaptasi Logika Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik Gerindra Menjelang Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Komunikasi* 22(1), 45-48.
- Ibad, S., & Musdalifah. (2020). Partai Politik: Tinjauan Strategi Dalam Meraih Dukungan Massa. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 89-100.
- Levitsky, S., & Way, L. A. (2020). *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Neumann, S. (2021). *Modern Political Parties: Approaches to Comparative Politics*. Chicago: University of Chicago Press.
- North, D. C. (2020). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nurani, A. S. (2023). Analisis Faktor Pembentuk Soliditas Pada Partai Gerindra Tahun 2014-2023. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(2), 299-309.
- Padangi, H. S. (2021). Strategi Politik Partai Gerindra Dalam Memenangkan Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Halmahera Barat. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 10(4), 1-15.
- Peters, B. G. (2021). *Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism (5th ed.)*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

- Posumah, D., Fure, C., & Pati, A. B. (2020). Strategi PDI-Perjuangan Dalam Pemenangan Calon Legislatif Perempuan di Kabupaten Halmahera Barat. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(1), Januari 2020.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84.
- Rahayu, A. V., Rahayu, N. P., Wardani, A. T., & Purnawati, L. (2024). Strategi Partai Politik dalam Meraih Suara di Pemilu Tahun 2024 (Studi Partai Gerindra Kabupaten Tulungagung). *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora*, 1(1), 48-57.
- Rosyid, H. (2019). Strategi Pemenangan Caleg Partai Gerindra pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(1), 60-73.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahda, P., & Rafni, A. (2021). Strategi Calon Legislatif Partai Gerindra dalam Memenangkan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 4(1), 66-72.
- Wanto, K. (2021). Pelembagaan Partai Politik (Assessment Derajat Kesisteman Vicky Randall dan Lars Svåsand pada Partai Gerindra Kota Tangerang). *Jurnal MoZaiK*, 13(1), 33-46.
- Widiastuti, A. (2024). Aktivitas Komunikator Politik Partai Gerindra dalam Peningkatan Perolehan Suara pada Pemilu 2024 di Kota Pekanbaru. *Mu'ashir: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 2(2), 183-208.
- Widiowati, B., & Pramutanto, W. (2021). Strategi Pemenangan Caleg Partai Gerindra dalam Pemilu Legislatif 2019: Studi Kasus Bambang Pujiyanto Dapil 2 Sidoarjo. *Jurnal Politik Indonesia*, 6(2), 72-80.
- Yandri, E., Krisnawansyah, Y., & Putri, R. P. (2024). Marketing Politik Partai Gerindra Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Kota Padang. *JAPAn: Jurnal Administrasi dan Pemerintahan*, 2(1), 80-84.